

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu cara untuk meningkatkan perekonomian dalam negara sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan semakin luasnya kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan secara merata. Tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara dapat dilihat dari jumlah pengangguran yang ada. Untuk negara berkembang seperti Indonesia, jumlah pengangguran masih menjadi masalah dalam pembangunan perekonomian. Padahal dengan adanya lapangan pekerjaan yang dapat memberikan wadah bagi masyarakat untuk bekerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Selain itu, dengan bekerja dapat menciptakan barang dan jasa bagi sektor perekonomian. Sebagaimana firman Allah :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Yang memiliki arti : “Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS At-Taubah: 105).

Negara Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak hingga saat ini, salah satunya yaitu Pulau Jawa. Dengan padatnya penduduk Pulau Jawa ini maka dapat dikatakan memiliki potensi tenaga kerja yang besar bagi pertumbuhan perekonomian. Namun dengan tingginya jumlah penduduk ini juga dapat menimbulkan masalah mengenai jumlah tenaga kerja yang tinggi sehingga harus diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang banyak pula. Oleh karena itu, penambahan lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan di Pulau Jawa.

Apabila suatu negara memiliki perekonomian yang berkembang dengan pesat tidak memiliki jaminan dikatakan negara makmur apabila tidak diimbangi dengan perluasan tenaga kerja agar nantinya dapat menampung tenaga kerja yang baru (Patriansyah, 2018).

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2013-2021

| Tahun | Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja | | | | | |
|-------|---------------------------------|------------|-------------|---------|------------|---------|
| | DKI Jakarta | Jawa Barat | Jawa Tengah | DIY | Jawa Timur | Banten |
| 2013 | 276.420 | 1.199.600 | 603.743 | 38.816 | 534.204 | 344.001 |
| 2014 | 429.110 | 1.775.196 | 996.344 | 67.418 | 843.490 | 484.053 |
| 2015 | 368.190 | 1.794.874 | 864.783 | 80.245 | 906.904 | 504.383 |
| 2016 | 317.007 | 1.873.861 | 801.330 | 57.036 | 839.283 | 498.593 |
| 2017 | 346.945 | 1.839.428 | 823.938 | 64.019 | 838.496 | 519.563 |
| 2018 | 314.841 | 1.848.234 | 814.347 | 73.350 | 850.474 | 496.732 |
| 2019 | 339.402 | 1.929.515 | 818.276 | 71.482 | 835.130 | 489.825 |
| 2020 | 572.780 | 2.533.076 | 1.214.342 | 101.946 | 1.301.145 | 661.661 |
| 2021 | 439.899 | 2.430.147 | 1.120.223 | 106.432 | 1.281.395 | 562.310 |

Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tahun 2013-2021 di Pulau Jawa selalu mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Hal ini wajar dikarenakan adanya siklus

ekonomi yang tidak stabil. Jumlah kenaikan tenaga kerja di Pulau Jawa selama periode 2012-2021 paling tinggi berada pada tahun 2020. Di mana semua provinsi di Pulau Jawa mengalami kenaikan tenaga kerja. Dari data di atas memperlihatkan bahwa masalah ketenagakerjaan masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di Pulau Jawa. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, dengan semakin banyak jumlah penduduk dan angkatan kerja namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan merupakan salah satu hal yang paling berdampak terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa.

Pemerintah memerlukan modal yang sangat besar dalam mencapai pembangunan ekonomi. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah melakukan beberapa cara salah satunya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Investasi dibedakan menjadi dua yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi dapat membantu menciptakan akumulasi modal yang digunakan dalam membangun usaha baru atau memperbaiki pada usaha yang sudah berjalan. Dengan investasi dapat menimbulkan beberapa keuntungan antara lain dapat meningkatkan penyerapan dalam negeri, meningkatkan pendapatan individu, dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan per kapita serta dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi (Feriyanto & Koriningpertiwi, 2019)

Tabel 1.2 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Pulau Jawa Tahun 2019-2021

| Provinsi | PMDN (Miliar Rupiah) | | |
|---------------|----------------------|----------|----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| DKI JAKARTA | 62.094,8 | 42.954,7 | 54.708,2 |
| JAWA BARAT | 49.284,2 | 51.400,5 | 59.948,5 |
| JAWA TENGAH | 18.654,7 | 30.606,1 | 31.311,2 |
| DI YOGYAKARTA | 6.298,8 | 2.683,4 | 2.761,3 |
| JAWA TIMUR | 45.452,7 | 55.660,6 | 52.552,2 |
| BANTEN | 20.708,4 | 31.145,7 | 25.989,5 |

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa selama 3 tahun terakhir DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur saling berurutan sebagai provinsi yang menjadi tempat investasi di Pulau Jawa. Pada tahun 2019 Provinsi DKI Jakarta menjadi tempat investasi terbesar dengan nilai investasi Rp. 62.094,8 miliar. Kemudian pada tahun 2020 Provinsi Jawa Timur menjadi tempat investasi terbesar dengan nilai Rp. 55.660,2 miliar dan tahun 2021 tempat investasi terbesar berada di Provinsi Jawa Barat dengan nilai Rp. 59.948,5 miliar. Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan berada di sana sehingga tidak salah apabila menjadi salah satu tempat investasi terbesar. Begitu juga dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur, pada kedua Provinsi tersebut terdapat banyak industri besar dan pabrik yang beroperasi di kedua daerah tersebut.

Dengan tingginya tingkat investasi ini nantinya dapat menunjukkan bahwa suatu negara memiliki sistem perekonomian yang baik sehingga akan banyak menarik para investor untuk menanamkan modal pada negara tersebut yang dapat berdampak baik bagi negara maupun bagi setiap daerah. Dengan adanya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan penanaman

Modal Asing (PMA) dapat meningkatkan kegiatan investasi masyarakat dapat mendorong masyarakat untuk terus produktif dalam menghasilkan barang dan jasa yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Selain itu tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi suatu daerah dalam satu periode. Kemudian untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita merupakan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk, sehingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Dengan semakin tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita maka semakin besar sumber penerimaan daerah karena semakin besarnya pendapatan masyarakat daerah tersebut. Sehingga dapat diartikan semakin tinggi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita maka semakin sejahtera penduduk suatu wilayah.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi dapat berdampak pada pengangguran karena dapat menyebabkan angka pengangguran yang tinggi. Dengan tingkat inflasi yang meningkat, nantinya akan membuat harga barang dan jasa akan naik. Lalu permintaan barang dan jasa akan mengalami penurunan, dengan begitu akan berdampak pada pengurangan permintaan

terhadap tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini akan berdampak pada meningkatkan jumlah pengangguran yang ada.

Setiap tahunnya di Indonesia terjadi Peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan tersebut memiliki hubungan erat dengan permasalahan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2013 sampai 2021 terus mengalami peningkatan.

Tabel 1.3 Upah Minimum Provinsi Pulau Jawa Tahun 2018-2020

| Provinsi | UMP | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| DKI JAKARTA | 3.648.036 | 3.940.973 | 4.276.350 |
| JAWA BARAT | 1.544.361 | 1.668.373 | 1.810.351 |
| JAWA TENGAH | 1.486.065 | 1.605.396 | 1.742.015 |
| DI YOGYAKARTA | 1.454.154 | 1.570.923 | 1.704.608 |
| JAWA TIMUR | 1.508.895 | 1.630.059 | 1.768.777 |
| BANTEN | 2.099.385 | 2.267.990 | 2.460.997 |

Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS)

Pada tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya Upah Minimum Provinsi (UMP) pada setiap provinsi di Pulau Jawa mengalami kenaikan yang berbeda-beda. Setiap daerah mengalami kenaikan sesuai dengan tingkat kehidupan minimumnya dari setiap masing-masing daerah. Namun dengan meningkatnya jumlah upah minimum ini tidak selalu dibarengi dengan meningkat pula penyerapan tenaga kerja karena setiap tahunnya meningkat pula tingkat jumlah penduduk dan angkatan kerja di Pulau Jawa.

Terdapat beberapa penelitian mengenai penyerapan tenaga kerja antara lain Widya Putra *et al* (2022) yang meneliti mengenai pengaruh Penanaman Modal Asing, Modal Dalam Negeri dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia 1990-2019. Dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) dan upah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kemudian Prasetyo (2022) meneliti mengenai Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Upah Minimum, dan Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2004-2020. Dari penelitian tersebut menyatakan bahwa PDRB positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa, Inflasi berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, Upah Minimum Provinsi (UMP) juga berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dan pendidikan berdampak positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.

Wihastuti & Rahmatullah (2018) dalam penelitiannya mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa menyatakan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Penelitian milik Warapsari *et al* (2020) mengenai Analisis Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur menunjukkan hasil penelitian bahwa inflasi berpengaruh negatif

dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan PDRB dan upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Lalu penelitian milik Komaludin (2020) yang meneliti mengenai *Demand for Labor Analysis: A Study of the Role of Foreign Direct Investment on Employment in Indonesia* menunjukkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan suku bunga kurang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif signifikan terhadap permintaan tenaga kerja.

Berdasarkan uraian di atas, yang masih menunjukkan berbagai faktor yang mempengaruhi naik turunnya tingkat penyerapan pada tenaga kerja, sehingga hal mengenai ketenagakerjaan masih menjadi masalah dalam perekonomian di Pulau Jawa. Di mana Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian di Indonesia dan menjadi tolak ukur perkembangan daerah lain di Indonesia. sehingga menimbulkan ketertarikan penulis untuk melakukan studi mengenai “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Inflasi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2013-2021”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa tahun 2013-2021?
2. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa tahun 2013-2021?
3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa tahun 2013-2021?
4. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa tahun 2013-2021?
5. Bagaimana pengaruh Produk Domestik regional Bruto (PDRB) Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa tahun 2013-2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang berdasar pada rumusan masalah yang sudah dipaparkan antara lain :

1. Mengetahui pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa tahun 2013-2021
2. Mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa tahun 2013-2021
3. Mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa tahun 2013-2021
4. Mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa tahun 2013-2021

5. Mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa tahun 2013-2021

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya dengan tema serupa.
2. Digunakan sebagai masukan dalam pertimbangan pengambilan keputusan untuk instansi-instansi terkait dalam kebijakan yang terkait dengan penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.